KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI III
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 EKT. 6701, 6703, FAKSIMILE (021) 3513201, 3513287
LAMAN http://www.bpsdmkp.kkp.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 168 /BPSDMP KP.04/TU.210/III/2016

TENTANG

REKRUTMEN PENYULUH PERIKANAN BANTU (PPB)
PUSAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN – BPSDMP KP TAHUN 2016 TAHAP 2

Dalam rangka memenuhi kuota kebutuhan Penyuluh Perikanan Bantu kabupaten/kota serta mengganti Penyuluh Perikanan Bantu yang sudah di angkat pada SK No.2/KEPMENKP/2016, Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tenaga kontrak Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang akan ditugaskan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

1. Informasi resmi Pendaftaran PPB hanya dapat dilihat melalui website Pusluhdaya KP;
2. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengirimkan lamaran asli kepada Panitia Rekrutmen PPB serta mengisi biodata pelamar pada website link yang ada pada pengumuman di ***www.pusluh.kkp.go.id*** **klik : https://goo.gl/jFDgD9**
3. Pendaftaran dimulai pada tanggal 11 s/d 19 Maret 2016;

II. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1.1. Persyaratan Umum

a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;
b. Berijazah D IV/S1 program studi Penyuluhan Perikanan ***atau*** berijazah D III / D IV / S1 bidang kelautan dan perikanan (IPK minimal 2,75 untuk pelamar baru);
c. Usia maksimum 35 tahun per 31 Desember 2015 untuk pelamar baru;
d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil / Honor Daerah / Program Pendampng Pemerintah lainnya/ Karyawan BUMN / Karyawan Swasta (disertakan surat keterangan);
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Berkelakuan baik;
g. Bersedia bekerja dengan status pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak;

h. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ASN;
i. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena sesuatu hal, tidak akan meminta ganti rugi;
j. Bersedia ditempatkan di Dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
k. Bersedia mendukung visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk sasaran strategi dan indikator kinerja, apabila telah dinyatakan diterima sebagai PPB.

1.2. Persyaratan Khusus

Harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di kabupaten/kota yang dilamar;

III. RINCIAN KEBUTUHAN PPB (Terlampir)

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

4.1. Ketentuan Umum

Tata Cara Pendaftaran

a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi administrasi Penyuluh Perikanan Bantu;
b. Pelamar harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi biodata pada logo rekrutmen ppb 2016 yang ada di website : ***www.pusluh.kkp.go.id***
c. Pelamar harus mengisi data secara benar dan tidak direkayasa. Bila kemudian ditemukan data yang diisi tidak benar, maka harus siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku;
d. Pelamar wajib mengirimkan email rekomendasi dari Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di kabupaten/kota melalui *rekrutmenppb2016@gmail.com* paling lambat tanggal 19 Maret 2016.
e. Selain melakukan pendaftaran secara online, pelamar juga harus mengirimkan berkas lamaran sebagaimana persyaratan pada poin 4.2. (surat lamaran);

4.2. Surat lamaran

Surat lamaran yang diterima hanya yang dikirim melalui pos, ditujukan kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari III, Lantai 6 ***paling lambat tanggal 19 Maret 2016*** cap pos. Tidak diperkenankan mengirimkan lamaran melalui email ataupun fax.

1. Berkas lamaran terdiri dari :
   a. Surat permohonan untuk menjadi tenaga kontrak Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) ditulis tangan;
   b. Pas photo ukuran 4 x 6 berwarna berlatar belakang biru sebanyak 3 lembar;

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
d. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
e. Fotocopy Transkrip nilai akademik terakhir yang telah dilegalisir;
f. Fotocopy legalisir / Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter (puskesmas / Rumah Sakit);
g. Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
h. Fotocopy Sertifikat keahlian yang pernah diikuti;
i. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengembangan SDM KP (Khusus tenaga Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2015);
j. Surat Keterangan pernah Bekerja/Magang/Penelitian;
k. Surat Pernyataan :
    1. tidak sedang menjalani pekerjaan sebagai CPNS/PNS/Honor Daerah/Karyawan BUMN/Karyawan Perusahaan Swasta;
    2. tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS/ASN;
    3. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
    4. bersedia ditempatkan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia.
l. Surat rekomendasi dari Dinas yang menangani kelautan dan perikanan di kabupaten/kota lokasi yang dilamar .

2. Lamaran disusun berurutan dan dimasukan ke dalam amplop coklat tertutup. Berkas dikirim melalui POS atau jasa pengiriman lainnya kepada Panitia Seleksi Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

KEPADA YTH :

Panitia Rekrutmen Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 Tahap 2
(Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP)
Gedung Mina Bahari III Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110

PENGIRIM :

Nama (dengan gelar) : ……
Pendidikan terakhir : (D3/D4/S1/S2 , jurusan/prodi……)
Lokasi yang dilamar : (kab/kota, provinsi)

.

3. Berkas lamaran yang sudah dikirim sebelum dibukanya pendaftaran secara resmi, maka dianggap tidak berlaku (harus dikirim ulang);
4. Panitia tidak menerima berkas secara langsung.

V. SELEKSI

Seleksi Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 meliputi seleksi administrasi yang diinput online dan berkas asli.

VI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diinformasikan melalui melalui website Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP **http://www.pusluh.kkp.go.id** dan/atau melalui email. Pastikan Anda mencantumkan alamat email yang valid.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dihubungi oleh Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP;
3. Penentuan hasil Seleksi administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP – BPSDMP KP dan tidak dapat diganggu gugat.

VII. LAIN-LAIN

1. Panitia seleksi Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) berhak menyatakan seseorang calon tidak diterima/dibatalkan/digugurkan menjadi Penyuluh Perikanan Bantu walaupun telah lulus seleksi administrasi dan verifikasi berkas, apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat persyaratan yang ternyata tidak benar/ tidak sah.

2. Berkas pelamar yang masuk ke Panitia menjadi arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
3. Seluruh tahapan seleksi Penyuluh Perikanan Bantu **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.**
4. Panitia seleksi Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) **TIDAK BERTANGGUNG JAWAB** atas segala pungutan atau tawaran apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Panitia.

VIII. PENUTUP

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal // Maret 2016

Kepala Pusat Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat KP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN * REPUBLIK INDONESIA *
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr. Endang Suhaedy

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Agama : .....

Alamat : .....

.....

.....

.....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya :

1. tidak sedang menjalani pekerjaan sebagai CPNS / PNS / Tenaga Kontrak / Honor Daerah / Karyawan BUMN/ Perusahaan Swasta;
2. tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
3. tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS/ASN;
4. bersedia ditempatkan di kabupaten/kota seluruh wilayah Indonesia;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diputuskan hubungan kerja secara sepihak dan bersedia diproses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

……, ……2016

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6000,-

……..

Lampiran 1

LOKASI DAN KEBUTUHAN PPB TAHUN 2016
TAHAP 2

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kebutuhan
1	ACEH	Kota Sabang	1
		Kabupaten Simeulue	3
		Kabupaten Aceh Barat	2
		Kabupaten Aceh Besar	2
		Kabupaten Pidie	2
		Kabupaten Aceh Barat daya	2
		Kabupaten Aceh Jaya	2
		Kabupaten Bireun	2
2	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Utara	3
		Kabupaten Mandailing Natal	1
		Kabupaten Tapanuli Selatan	1
		Kabupaten Deli Serdang	1
		Kabupaten Serdang Bedagai	1
		Kabupaten Langkat	2
		Kabupaten Asahan	2
		Kabupaten Labuhan Batu Utara	2
		Kabupaten Tebing Tinggi	1
		Kabupaten Nias Selatan	2
3	SUMATERA BARAT	Kabupaten Mentawai	10
		Kabupaten Padang Pariaman	2
		Kabupaten Pasaman Barat	2
4	KEPULAUAN RIAU	Kota Tanjung Pinang	1
		Kabupaten Kepulauan Natuna	2
5	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Rawas	1
		Kabupaten Ogan Ilir	1
		Kabupaten Banyuasin	1
		Kabupaten Ogan Komering Ilir	1
		Kabupaten Musi Banyuasin	1
		Kabupaten Musi Rawas	1
		Kabupaten Musi Banyuasin	1
6	RIAU	Kabupaten Kepulauan Meranti	2
		Kabupaten Bengkalis	1
		Kabupaten Rokan Hilir	1
		Kabupaten Siak	1
		Kabupaten Kota Pekanbaru	1
		Kota Dumai	1
		Kabupaten Kampar	1
		Kabupaten Indragiri Hilir	1
7	JAMBI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2
		Kabupaten Kerinci	1
		Kabupaten Muaro Jambi	1

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kebutuhan
		Kabupaten Tebo	2
		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1
8	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Selatan	1
		Kabupaten Bengkulu Utara	2
		Kabupaten Kaur	1
		Kabupaten Seluma	1
		Kabupaten Muko-muko	1
		Kabupaten Bengkulu Tengah	1
		Kota Bengkulu	1
9	BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Barat	3
		Kabupaten Bangka	2
		Kabupaten Belitung	2
		Kabupaten Bangka Selatan	2
		Kabupaten Bangka Tengah	2
		Kota Pangkal Pinang	2
10	LAMPUNG	Kabupaten Tulang Bawang	1
		Lampung Selatan	2
		Tanggamus	2
11	DKI JAKARTA	Kota Adm. Jakarta Selatan	1
		Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	3
		Kota Adm Jakarta Utara	2
		Kota Adm. Jakarta Timur	1
12	BANTEN	Kabupaten Tangerang	2
		Kota Cilegon	4
		Kabupaten Lebak	3
		Kabupaten Pandeglang	1
		Kota Serang	3
13	JAWA BARAT	Kabupaten Purwakarta	1
		Kabupaten Bandung	1
		Kabupaten Karawang	1
		Kabupaten Cirebon	2
		Kabupaten Pangandaran	2
14	JAWA TIMUR	Kabupaten Brebes	1
		Kabupaten Cilacap	2
		Kabupaten Demak	4
		Kabupaten Jepara	2
		Kabupaten Kendal	2
		Kabupaten Pemalang	2
		Kabupaten Rembang	5
		Kota Semarang	2
		Kota Tegal	2
		Kota Pekalongan	2
15	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Kulon Progo	2

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kebutuhan
		Kabupaten Bantul	2
		Kabupaten Gunung Kidul	4
16	JAWA TIMUR	Kabupaten Pasuruan	3
		Kabupaten Magetan	1
		Kabupaten Trenggalek	2
		Kabupaten Pacitan	2
		Kabupaten Probolinggo	5
		Kabupaten Sampang	10
		Kabupaten Sidoarjo	1
		Kabupaten Sumenep	1
		Kabupaten Situbondo	1
		Kabupaten Tuban	1
		Kabupaten Pamekasan	2
17	BALI	Kabupaten Klungkung	2
		Kabupaten Buleleng	3
		Kabupaten Jembrana	2
		Kabupaten Badung	2
		Kabupaten Gianyar	2
		Kota Denpasar	2
18	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	1
		Kabupaten Bima	3
		Kabupaten Lombok Timur	3
		Kabupaten Lombok Barat	2
		Kabupaten Sumbawa Barat	2
		Kabupaten Dompu	2
		Kabupaten Sumbawa	2
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Timur	5
		Kabupaten Alor	1
		Kabupaten Timor Tengah Utara	3
		Kabupaten Kupang	4
		Kabupaten Sabu Raijua	4
		Kabupaten Rote Ndao	10
		Kabupaten Flores Timur	2
		Kabupaten Sikka	2
		Kabupaten Ende	2
		Kabupaten Manggarai Barat	2
		Kabupaten Nagekeo	2
		Kabupaten Manggarai Timur	1
		Kota Kupang	2
		Kabupaten Belu	2
		Kabupaten Ngada	1
		Kabupaten Lembata	2
		Kabupaten Flores	2
		Kabupaten Manggarai	2

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kebutuhan
20	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1
		Kabupaten Kotabaru	3
		Kabupaten Tanah Laut	3
		Kabupaten Tanah Bumbu	2
		Kota Banjarmasin	2
21	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	1
		Kabupaten Kotawaringin Barat	3
		Kabupaten Katingan	2
		Kabupaten Seruyan	2
		Kabupaten Sukamara	2
		Kabupaten Murung Raya	2
22	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	1
		Kabupaten Nunukan	5
		Kabupaten Bulungan	2
23	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sekadau	2
		Kabupaten Kubu Raya	2
		Kabupaten Sambas	2
		Kabupaten Ketapang	2
		Kabupaten Kayong Utara	2
		Kota Singkawang	2
		Kabupaten Bengkayang	2
		Kabupaten Mempawah	2
24	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Paser	2
		Kabupaten Kutai Kertanegara	2
		Kabupaten Penajem Paser Utara	2
		Kabupaten Berau	3
25	SULAWESI UTARA	Kota Manado	1
		Kota Kotamobagu	1
		Kota Bitung	3
		Kabupaten Talaud	11
		Kabupaten Bolaang Mongondow	1
		Kabupaten Minahasa	1
		Kabupaten Minahasa Utara	2
26	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	2
		Kabupaten Banggai	3
		Kabupaten Parigi Moutong	5
		Kabupaten Poso	1
		Kabupaten Donggala	2
		Kabupaten Tojo Una-una	2
		Kabupaten Banggai Kepulauan	2
		Kabupaten Tolitoli	1
		Kota Palu	2
27	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Sinjai	3
		Kabupaten Jeneponto	4

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kebutuhan
		Kabupaten Takalar	5
		Kota Pare-Pare	1
		Kabupaten Bantaeng	1
		Kabupaten Pangkajene Kepulauan	4
		Kota Makassar	2
		Kabupaten Bone	2
		Kabupaten Maros	2
		Kabupaten Barru	2
		Kabupaten Wajo	2
		Kabupaten Bantaeng	2
		Kabupaten Bulukumba	2
		Kabupaten Pinrang	2
		Kabupaten Luwu	2
28	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Utara	3
		Kabupaten Konawe Selatan	3
		Kabupaten Konawe Kepulauan	1
		Kabupaten Kolaka	2
		Kabupaten Buton	2
		Kabupaten Bombana	2
		Kota Kendari	2
		Kota Bau-Bau	2
		Kabupaten Muna	2
		Kabupaten Konawe Utara	2
		Kabupaten Banggai Laut	2
		Kabupaten Konawe	1
		Kabupaten Wakatobi	1
29	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju	2
		Kabupaten Mamuju Utara	1
		Kabupaten Majene	2
		Kabupaten Polewali Mandar	1
		Kabupaten Mamasa	1
30	Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	4
		Kota Gorontalo	2
		Kabupaten Gorontalo	1
		Kabupaten Boalemo	2
		Kabupaten Bone Bolango	2
31	MALUKU	Kabupaten Seram Bagian Timur	3
		Kabupaten Maluku Barat Daya (Pulau Kisar)	10
		Kota Ambon	2
		Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2
		Kota Tual	12
32	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Selatan	2

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kebutuhan
		Kabupaten Halmahera Barat	2
		Kabupaten Halmahera Utara	2
		Kabupaten Pulau Taliabu	2
		Kota Ternate	1
		Kabupaten Pulau Morotai	4
33	PAPUA	Kabupaten Merauke	2
		Kabupaten Biak Numfor	4
		Kabupaten Sarmi	10
		Kabupaten Mimika	10
		Kabupaten Merauke	2
		Kabupaten Jayapura	2
		Kabupaten Nabire	1
34	PAPUA BARAT	Kabupaten Maybrat	1
		Kabupaten Teluk Bintuni	4
		Kabupaten Fak Fak	2
		Kota Sorong	2
		Kabupaten Raja Ampat	2
		Kabupaten Teluk Wondama	3
		Kabupaten Kaimana	4
		Kabupaten Sorong Selatan	1
		Kabupaten Tambrauw	3
Total			**533**